

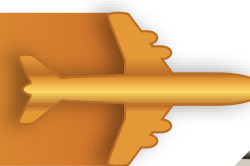


PEMERINTAH KECAMATAN AMALI
KABUPATEN BONE

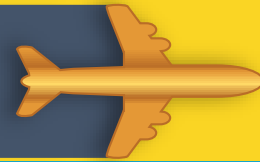
L K J i P
LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2021



KALEIDOSKOP JANUARI-DESEMBER 2021



**KECAMATAN
AMALI**



Rapat Koordinasi

Rapat rutin awal tahun membahas program kegiatan yang akan dilaksanakan serta evaluasi kegiatan tahun sebelumnya bersama Aparat Kecamatan, urah dan Kades



Bimbingan Teknis KPM

Dalam bimtek tersebut di sosialisasikan tata cara penanganan Stunting dan Monev pendataan dengan menggunakan aplikasi Android.



Kegiatan Abdi Desa

Kegiatan yang di selenggarakan oleh mahasiswa IKMB Unhas di Desa Mataropurae untuk pengabdian kepada masyarakat



Penjemputan Vaksin Covid 19

Vaksin Covid 19 tiba di Puskesmas Taretta dengan pengawalan dari unsur TNI/Polri dan Pemerintah setempat



Vaksinasi bagi Tenaga Medis

Vaksinasi Covid19 perdana dilakukan oleh Puskesmas Taretta bagi tenaga medis lingkup Kecamatan Amali



Pelantikan dan Rapat Kerja Pengurus Himpunan Mahasiswa Amali 2021-2027

Himpunan Mahasiswa Amali Melaksanakan Pelantikan dan Rapat Kerja Pengurus di Gedung Serbaguna Yayasan Andi Baso Mappasala Taretta



Musrenbang RKPD Tahun 2021

Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD tingkat Kecamatan Amali tahun 2021, dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Bone.



Peninjauan Pemakaman Korban Covid 19

Bersama Tripika memantau pelaksanaan prosesi pemakaman korban Covid 19



Monev DD Tahap 3 Tahun Anggaran 2020

Meninjau langsung hasil realisasi penggunaan DD tahap 3 TA 2020 di seluruh desa se-Kecamatan Amali



Kerja Bakti

Kegiatan kerja bakti bersama unsur aparat dan masyarakat kelurahan mampotu dilaksanakan secara rutin tiap bulan



Peninjauan pekerjaan jalan provinsi

Mendampingi Anggota DPR RI komisi 3, H. Aras meninjau lokasi pekerjaan jalan aspal di jalan poros cabbenge-amali





Rapat Lintas Sektor rutin dilaksanakan setiap bulan di PKM Taretta membahas tentang capain kinerja PKM Taretta dan kondisi kesehatan masyarakat



Musyawarah Korpri Unit Kecamatan Amali dalam rangka penetapan pengurus korpri dan rapat kerja perdana.



Mediasi masyarakat yang bersengketa tanah warisan



Verifikasi Kecamatan Sehat oleh Pembina dari pengurus kabupaten sehat



Ziarah Makam Raja Bone dalam rangka memperingati hari jadi bone ke-691



Musdes pemilihan dan penetapan anggota BPD periode 2021-2027 dilaksanakan seluruh desa se-Kecamatan Amali



Untuk informasi kegiatan
secara rinci dapat mengunjungi
Instagram
kecamatanamali01

Pelaksanaan Shalat ID

Shalat Id Fitri dan Id
Adha dilaksanakan di
masjid dengan
menerapkan protokol
kesehatan

Pembagian Sembako

Pembagian paket sembako
bagi masyarakat yang telah
terverifikasi data dari
Kemensos RI

Festival Inovasi

Kecamatan Amali mengikuti
festival inovasi yang di
selenggarakan oleh
Bapplitbangda Kabupaten
Bone dengan inovasi
RUKO KONDE

Pilkades

Pelaksanaan pilkades
serentak gelombang
pertama tahun 2021 di
desa se Kecamatan
Amali

BLT Dana Desa

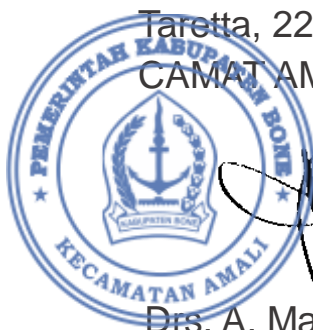
Penyerahan BLT Dana
Desa sampai tahap 9 bagi
KPM yang telah terdaftar
disetiap Desa melalui
Musdes Penetapan KPM



Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKJIP) SKPD Kecamatan Amali tahun 2021 dapat diselesaikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan selama tahun 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkempeningan dapat memperoleh gambaran tentang kinerja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Amali.

Akhir kata kami berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja dimasa yang akan datang bagi seluruh jajaran Pemerintah Kecamatan Amali.



Taretta, 22 Februari 2021
CAMAT AMALI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Mallanti'.

Drs. A. Mallanti M.Si
NIP. 19661025 198603 1 006

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	01
--------------	--------------------	-----------

BAB II	PERENCANAAN KINERJA	10
---------------	----------------------------	-----------

BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	17
----------------	------------------------------	-----------

BAB IV	PENUTUP	37
---------------	----------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN		
--------------------------	--	--



1



A. UMUM

HAL. 1

Mengambarkan mengapa pentingnya akuntabilitas kinerja dan dasar hukum yang mendasari

2



B. ORGANISASI

HAL. 2

Menggambarkan dasar hukum pembentukan organisasi, tugas dan fungsi, struktur organisasi dan kondisi kepegawaian

3



C. ISU STRATEGIS

HAL. 7

Isu Strategis, adalah merupakan sebuah kondisi / perkembangan / peristiwa / trend yang berkenaan dengan lingkungan organisasi dan berdampak terhadap kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan serta strategi-strategi organisasi

4



D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI HAL. 9

Usaha yang dilakukan dalam meningkatkan kinerja Organisasi

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Amali

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Kecamatan Amali. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

B. ORGANISASI

Jumlah Kelurahan dan Desa

Secara Administratif Kecamatan Amali terdiri dari 1 Kelurahan dan 14 Desa sebagai berikut :

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Kelurahan Mampotu | 10. Desa Ta'cipong |
| 2. Desa Tocinnong | 11. Desa Waemputtange |
| 3. Desa Mattaropuræ | 12. Desa Bila |
| 4. Desa Waempubbu | 13. Desa Amali Riattang |
| 5. Desa Wellulang | 14. Desa Ulaweng Riaja |
| 6. Desa Ajang Laleng | |
| 7. Desa Laponrong | |
| 8. Desa Benteng Tellue | |
| 9. Desa Tassipi | |



ASPEK DEMOGRAFI

LUAS WILAYAH : 119,13 Km²

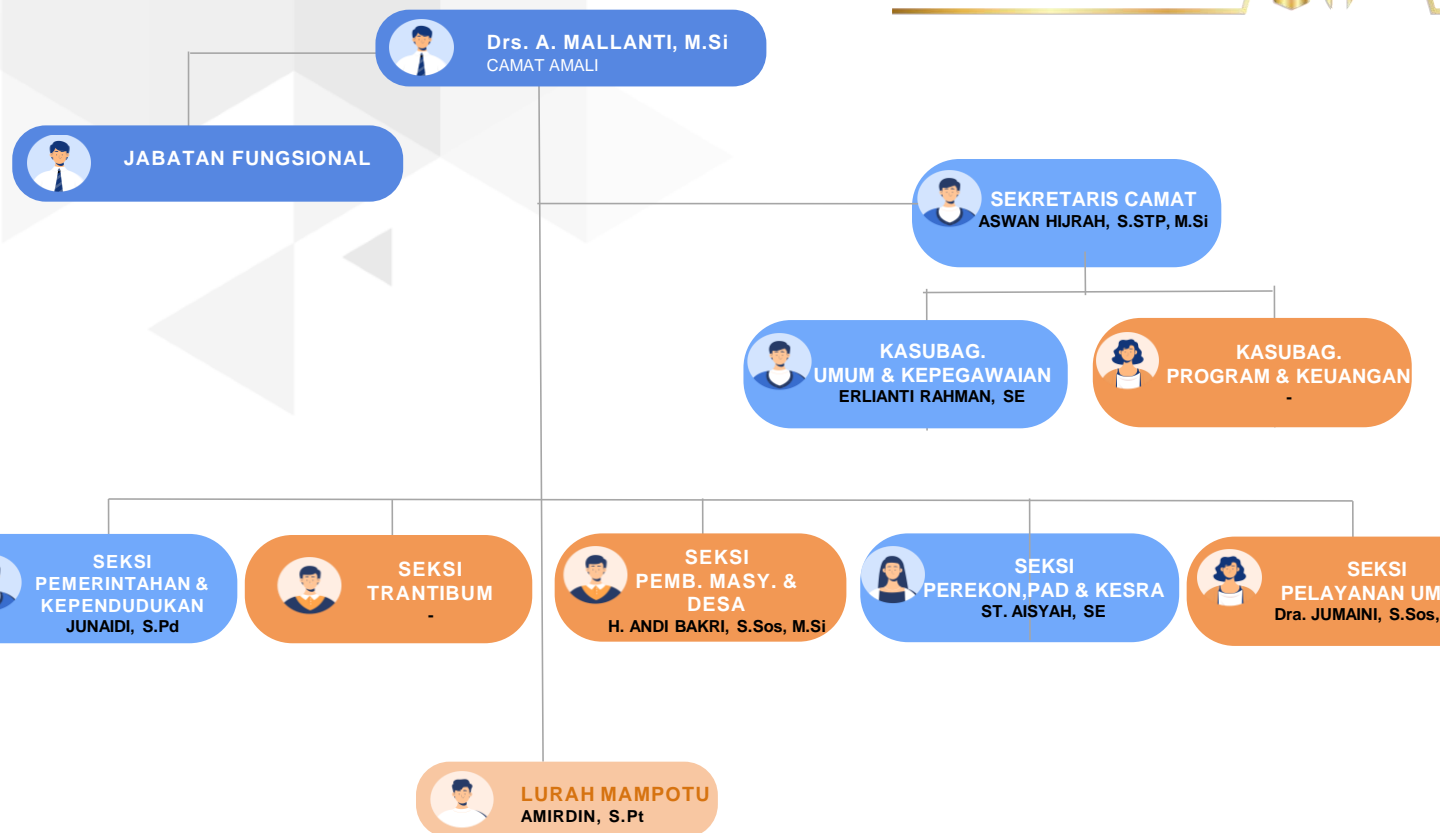
PENDUDUK : 23.717 Jiwa

- LAKI-LAKI: 11.301
- PEREMPUAN: 12.411

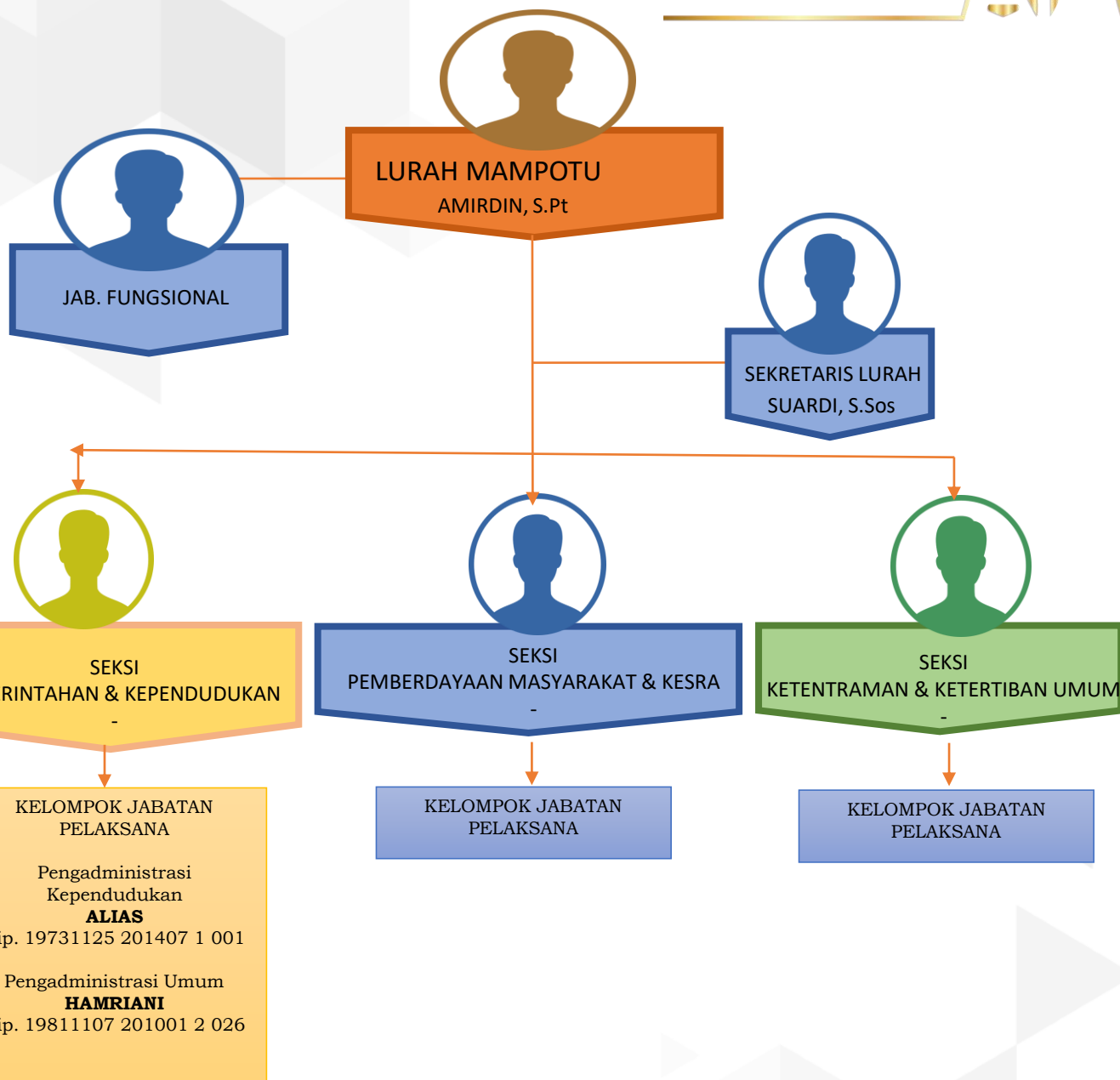
BATAS ADMINISTRASI

- SEBELAH UTARA : KEC. AJANGALE
- SEBELAH SELATAN : KEC. ULAWENG
- SEBELAH TIMUR : KEC. DUA BOCCOE DAN KEC TELLU SIATTINGE
- SEBELAH BARAT : KEC. LILI RILAU KAB. SOPPENG

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR CAMAT AMALI



STRUKTUR ORGANISASI KANTOR LURAH MAMPOTU



Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Pemerintah Kecamatan Amali memiliki 19 ASN. Berikut merupakan sumber daya manusia Kecamatan Amali Kabupaten Bone:

NO	PANGKAT	GOL	JUMLAH
1	Pembina TK.I	IV/b	1
2	Pembina	IV/b	1
3	Penata TK. I	III/d	4
4	Penata	III/c	1
5	Penata Muda TK. I	III/b	1
6	Penata Muda	III/a	1
7	Pengatur TK I	II/d	4
8	Pengatur	II/c	1
9	Pengatur Muda	II/b	3
10	Pengatur	II/a	2
JUMLAH			19

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN AMALI

tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Amalidiatu dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

CAMAT

1

Kecamatan dipimpin oleh Camat yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan pemerintahan di wilayah kecamatan dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepada Daerah.

SEKRETARIS CAMAT

2

Sekretariat kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan tugas koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggungjawab kecamatan.

KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN

3

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi kepegawaian tata naskah dinas

KASUBAG PROGRAM & KEUANGAN

4

Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan yang mempunyai tugas Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, perencanaan, penyusunan, monitoring, pelaporan dan evaluasi program kerja dan keuangan

KASI PEMERINTAHAN DAN KEPENDUDUKAN

5

Seksi Pemeritahan dan Kependudukan dipimpin oleh Kepala Seksi Pemeritahan dan Kependudukan yang mempunyai tugas membantu camat dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan desa/kelurahan

6

KASI TRANTIBUM

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum

7

SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat yang mempunyai tugas membantu Camat Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

8

SEKSI PEREKONOMIAN, PAD DAN KESRA

Seksi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Seksi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat yang melaksanakan tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan perekonomian dan PAD serta kesejahteraan rakyat

9

SEKSI PELAYANAN UMUM

Seksi Pelayanan Umum oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum yang melaksanakan tugas membantu Camat Memfasilitasi pelayanan umum dan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas pelayanan umum

Tugas Pokok dan Fungsi secara lengkap dapat di akses dengan memindai QR Barcode berikut:



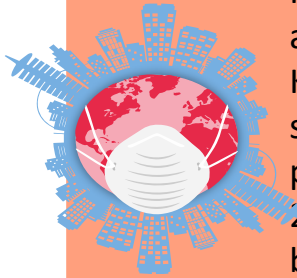
VIEW NOW

C. ISU STRATEGIS

Isu strategis seperti yang tertuang dalam Permendagri 86/2017 adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan Dalam Perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/Panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang

Melihat gambaran permasalahan pembangunan di tingkat Kecamatan, dan memperhatikan faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan, maka dapat dirumuskan isu strategis yang dihadapi Kecamatan Amali adalah sebagai berikut:

1



Virus corona (Covid-19) dideklarasikan oleh WHO (World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia) sebagai pandemic pada tanggal 9 Maret 2020. Hal ini berarti bahwa virus corona dianggap telah menyebar secara luas di dunia

2



Reformasi Birokrasi, SDM aparatur yang tersedia di Kecamatan Amali sebagai unit pelayanan kepada masyarakat masih dirasakan kurang, baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas maupun secara kuantitas sehingga belum dapat berjalan maksimal seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat.

3



Keterbatasan jangkauan serta kapasitas pembinaan yang disebabkan keterbatasan anggaran serta kewenangan.

4



Keterbatasan sarana dan prasarana perkantoran, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi gairah serta produktivitas aparatur.

5



Kondisi jalan yang masih kurang baik, baik dari kantor kecamatan ke Kabupaten maupun ke Desa-desa

6



Tata kelola Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN

7



Reformasi Birokrasi, SDM aparatur yang tersedia di Kecamatan Amali sebagai unit pelayanan kepada masyarakat masih dirasakan kurang, baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas maupun secara kuantitas sehingga belum dapat berjalan maksimal seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat.

8



Kinerja ekonomi yang melemah ini turut pula berdampak pada situasi ketenagakerjaan di Indonesia. Terhambatnya aktivitas perekonomian secara otomatis membuat pelaku usaha melakukan efisiensi untuk menekan kerugian, sehingga banyak pekerja yang dirumahkan atau bahkan diberhentikan (PHK). Apabila resesi terus berlanjut, diperkirakan akan berdampak secara riil pada masyarakat dalam hal penurunan pengeluaran konsumsi masyarakat, sehingga mendorong potensi penambahan penduduk rentan miskin dan miskin.

D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Aspek-aspek strategis Kecamatan Amali diperoleh dengan mengakomodasi isu organisasi (Kecamatan Amali), permasalahan dan atau arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Bone 2021-2023. Isu - isu strategis adalah permasalahan - permasalahan yang mendesak dan perlu segera ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Bone, khususnya yang ada di wilayah Kecamatan Kecamatan Amali. Adapun strategi yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Amali untuk sebagai berikut:

PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS PEGAWAI

- Pemberian kesempatan kepada pegawai untuk melanjutkan pendidikan/belajar ke jenjang yang lebih tinggi baik lewat tugas belajar maupun mempermudah pemberian izin belajar.
- Memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti Diklat, Bimtek, Kursus, Seminar, Work Shop, dll yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman pegawai

MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR

- Pengadaan atau penambahan peralatan kantor, seperti pengadaan computer, laptop, LCD, kamera, printer dan jaringan Internet.
- Pembuatan atau penambahan gedung baru untuk perkantoran maupun gedung pelayanan

PEMBINAAN PEGAWAI

- Melaksanakan evaluasi internal secara berkala
- Membuat telaan staf tentang pengisian jabatan lowong di Kantor Camat dan Kantor Lurah

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI

- Pemberian penghargaan pada pegawai adalah merupakan suatu hal yang penting, sebab dengan adanya pemberian penghargaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan serta dapat mendorong para pegawai mendapat atau mencapai sesuatu yang terbaik.
- Motivasi kerja merupakan stimulus atau rangsangan bagi setiap pegawai untuk bekerja dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan motivasi yang tinggi akan lebih bersemangat dan bergairah dalam bekerja
- Menerapkan system penghargaan secara proporsional akan dapat meningkatkan motivasi kerja, penghargaan yang diberikan dapat berupa kompensasi, gaji, tambahan penghasilan dll.

Jenis Pelayanan

Surat Pengantar Pembuatan KK

1

Surat Pengantar Pembuatan KTP

4

Surat Pengantar Pembuatan KIA

5

Legalisasi Berkas

8

Konsultasi Perekonomian Desa

9

2

Surat Pengantar Pembuatan Akte Kematian

3

Surat Pengantar Pindah Domisili

6

Perekaman E-KTP

7

Surat Pengantar Pembuatan Akte Kelahiran

10

Konsultasi Penyelenggaran Pemerintahan Desa/Kelurahan

GRATIS

...

Semua Jenis Pelayanan Dapat diselesaikan dalam waktu 10 Menit



BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

- | | |
|--------------------------------|---------|
| A. Tujuan dan Sasaran | Hal. 10 |
| B. Strategi dan Arah Kebijakan | Hal. 11 |
| C. Indikator Kinerja Utama | Hal. 12 |
| D. Perjanjian Kinerja | Hal. 14 |
| E. Standar Penilaian Kinerja | Hal. 14 |



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. TUJUAN DAN SASARAN

Setiap misi yang baik selalu mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dari setiap misi yang ada. Penilaian kinerja dari setiap misi dapat terlihat dari pencapaian tujuan yang terarah dengan sasaran yang tepat. Demikian juga dengan misi pembangunan Kecamatan Amali Tahun 2018-2023 juga mempunyai tujuan dari setiap misi dan setiap tujuan tersebut mempunyai sasaran yang harus dicapai. Pencapaian tujuan dari setiap misi pembangunan Kecamatan Amali akan dapat lebih mudah terwujud dengan adanya dukungan dari semua pihak yang terkait sebagai stakeholder dari Pemerintah Kabupaten Bone melalui comprehensive strategy yang secara terpadu, konstruktif, dan terukur mulai dari proses penerapan misi sampai dengan pencapaian visi seperti yang telah ditetapkan.

Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah kecamatan merupakan pernyataan yang menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bone 2018-2023 yang disertai dengan indikator kinerja. Tujuan Rencana Strategis merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan ditetapkannya Tujuan Rencana Strategis Kecamatan Amali, maka Kecamatan Amali dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

1. Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Amali

Tujuan yang hendak dicapai dalam rangka mewujudkan Misi 1 adalah ***“Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Amali”***.

1. Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Amali

Untuk mencapai tujuan diatas, telah ditetapkan dalam sebuah sasaran yang merupakan hasil dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tiga tahun ke depan. Sasaran yang ingin di capai tersebut adalah ***‘Meningkatnya Kualitas Pelayanan Public’***

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Amali

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	Kondisi Awal Tahun 2020	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN		
					2021	2022	2023
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Amali	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.	Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP	B	70,03 BB	70,20 A	80,01 A
			Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan (%)	93	94	95	96

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. STRATEGI

Upaya Perangkat Daerah Kecamatan Amali dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional dan efektif merupakan wujud melaksanakan misi Pemerintah Kabupaten Bone sebagai bentuk dukungan Perangkat Daerah Kecamatan Amali sebagai stakeholder dan bagian dari Pemerintah Kabupaten Bone dalam menerapkan strategi dan kebijakan. Strategi dan kebijakan ini menjadi dasar dan arah dalam menyelenggarakan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Amali selama kurun waktu 2018-2023. Kecamatan Amali berupaya menerapkan komprehensiv strategi yang secara terpadu, konstruktif, dan terukur mulai dari proses penerapan misi sampai dengan pencapaian visi seperti yang telah ditetapkan. Penetapan strategi dan kebijakan ini sebagai upaya pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk kurun waktu 2018-2023 serta memiliki dampak yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran dari setiap misi.

Strategi Perangkat Daerah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat daerah untuk mencapai sasaran yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dalam jangka waktu menengah perangkat daerah.

Untuk pencapaian tujuan pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Kecamatan Amali, maka ditetapkan strategi yaitu: ***‘Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi melalui perbaikan manajemen perangkat daerah’***

2. ARAH KEBIJAKAN

Serangkaian strategi yang telah ditetapkan, selanjutnya diformulasikan dalam bentuk arah kebijakan perangkat daerah yang merupakan kerangka piker atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan kinerja pelayanan atau isu-isu strategis daerah/perangkat daerah sebagai penjabaran strategis, arah kebijakan ini akan dilaksanakan secara bertahap selama lima tahun kedepan untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan yang dimaksud berkaitan dengan ruang lingkup pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan dan penggunaan sumber daya yang ada pada perangkat daerah.

Untuk mencapai tujuan pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) maka arah kebijakan yang ditetapkan Kecamatan Amali adalah ***‘Mengembangkan system operasional prosedur pelayanan dan tata laksana unsur penunjang pemerintahan umum’***

Tabel 5
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan



C. INDIKATOR KINERJA UTAMA

IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Amali ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bone Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 87 Tahun 2018 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone

NO	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
Kecamatan					
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP	Nilai Predikat SAKIP berdasarkan Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah selaku APIP	Inspektorat Kabupaten Bone	Camat
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang Dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	$\frac{\text{Jumlah Pelayanan Publik yang Dilayani/Ditindaklanjuti sesuai Standar}}{\text{Jumlah Pelayanan Publik yang Masuk}} \times 100\%$	Seksi Pemerintahan dan Kependudukan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Seksi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat, dan Seksi Pelayanan Umum	Camat

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Amali

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Kondisi Awal Tahun 2020	TARGET KINERJA		
					TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN		
					2021	2022	2023
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Amali	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.	Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP	B	BB	A	A
			Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan (%)	93	94	95	96

D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian kinerja disepakati bersama antara penerima dan pemberi amanah dan merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

Perjanjian kinerja inilah yang menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja seluruh PNS di lingkup Pemerintah Kecamatan Amali, mulai dari level pimpinan tertinggi (eselon III), sampai ke Pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi serta hasil turunan (cascading) dari perjanjian kinerja atasannya. Untuk mewujudkan kinerja tersebut Pemerintah Kecamatan Amali mendapat dukungan anggaran dari APBD sebesar Rp **8.361.777.021** yang digunakan untuk melaksanakan 5 program, yang terdiri dari 11 kegiatan sebagai berikut

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Amali	Hasil Evaluasi Sakip Oleh Apip	BB	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	8.376.325.021
	Presentase Pelayanan Kepada Masyarakat Yang Dilaksanakan Sesuai Standar Pelayanan	94	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	9.264.200
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			335.520.000	
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum			27.000.000	
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa			18.000.000	
Jumlah			8.657.637.221	

Secara lengkap Perjanjian Kinerja Kecamatan Amali dapat di akses dengan memindai QR Barcode berikut:



E. STANDAR PENILAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Standar penilaian kinerja terhadap laporan kinerja perangkat daerah merupakan tolok ukur keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program, kegiatan dan sub kegiatan. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Kecamatan Amali Kabupaten Bone maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Nilai %	Pencapaian
110 ke atas	Sangat tercapai/Sangat berhasil
90 x 110	Tercapai/Berhasil
60 x 90	Cukup tercapai/Cukup berhasil
X 60	Tidak tercapai/Tidak berhasil

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja adalah:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Jenis Pelayanan

Surat Pengantar Pembuatan KK

1

Surat Pengantar Pembuatan KTP

4

Surat Pengantar Pembuatan KIA

5

Legalisasi Berkas

8

Surat registrasi Permohonan Kredit

9

Surat Rekomendasi

11

Konsultasi Perekonomian Desa

13

2

Surat Pengantar Pembuatan Akte Kematian

3

Surat Pengantar Pindah Domisili

6

Perekaman E-KTP

7

Surat Pengantar Pembuatan Akte Kelahiran

10

Surat registrasi keterangan tidak Mampu

12

Surat Register Keterangan Ahli Waris

14

Konsultasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan

GRATIS

Semua Jenis Pelayanan Dapat diselesaikan dalam waktu 10 Menit

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA



A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Hal. 18
2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023 Hal. 19
3. Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra Hal. 20
4. Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/ Standar Nasional Lainnya Hal. 22
5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Hal. 22
6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Hal. 25
7. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja Hal. 27

B. REALISASI KEUANGAN

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban

yang dilaksanakan secara periodik setiap tahun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu upaya untuk terciptanya pemerintahan yang baik (Good Governance).

Pemerintah Kecamatan Amali mengemban amanah masyarakat Kabupaten Bone dalam bidang Pelayanan Publik, sehingga memiliki kewajiban untuk menyajikan Laporan Kinerja Tahunan sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Pemerintah. Laporan kinerja tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis dan sasaran program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Perubahan Kecamatan Amali Tahun 2021-2023 dan Rencana Kerja Kecamatan Amali Tahun 2021.

Sebagai wujud akuntabilitas kinerja organisasi penilaian capaian indikator kinerja utama menggambarkan capaian indikator outcomes. Dengan demikian, penilaian capaian kinerja Kecamatan Amali merupakan agregat dari capaian kinerja pada unit kerja eselon III. Untuk mengukur indikator kinerja, penilaian dilakukan dengan melakukan pemetaan terhadap aspek sasaran, program, kegiatan dan indikator yang termuat dalam Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja dan DPA Kecamatan Amali.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Kecamatan Amali menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Kecamatan Amali sesuai dengan hasil pengukuran kinerja

Kecamatan Amali Pengukuran kinerja Kecamatan Amali dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja setiap indikator tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Capaian indikator kinerja tujuan/sasaran atas perjanjian kinerja di atas mengacu pada tujuan/sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Amali meliputi:

Sasaran 1: Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Amali dengan indikator:

⇒ Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP

Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator:

⇒ Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan

Untuk setiap pernyataan kinerja tujuan/sasaran strategis tersebut di atas dilakukan analisis capaian kinerja tahun 2021 sebagai berikut:

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Capaian kinerja tahun anggaran 2021 merupakan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan membandingkan target kinerja dan realisasinya pada tahun 2021 sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021	Keterangan
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Amali	Hasil Evaluasi Sakip Oleh APIP	BB	A***	100%	Melampaui Target/berhasil
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai	94	95	100%	Melampaui Target/Sangat berhasil

	Standar Pelayanan				
Rata-rata				100%	Sangat berhasil

Sumber data : ***data sementara berdasarkan hasil penilaian evaluasi internal mandiri dan Laporan Hasil Pengukuran Kinerja 2021

Berdasarkan data di atas, target Hasil Evaluasi Sakip Oleh APIP Kecamatan Amali tahun 2021 telah melampaui target yang telah ditetapkan dalam Renstra Perubahan Kecamatan Amali periode 2018-2023 pada tahun anggaran 2021, dengan nilai setelah melakukan penilaian evaluasi internal secara mandiri dengan predikat nilai A***. nilai ini masih bersifat sementara, karena belum dilakukan evaluasi oleh APIP.

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PELAYANAN PUBLIK YANG MASUK				TOTAL	JUMLAH PELAYANAN PUBLIK YANG DILAYANI /DITINDAKLANJUTI				TOTAL	CAPAIAN %
		TW I	TW II	TW III	TW IV		TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	Surat Pengantar Pembuatan KK (berkas)	17	22	15	21	75	17	22	15	21	75	100
2	Surat Pengantar Pembuatan KTP (berkas)	11	9	16	25	61	11	9	16	25	61	100
3	Surat Pengantar Pembuatan KIA (berkas)	15	13	25	18	71	15	13	25	18	71	100
4	Surat Pengantar Pembuatan Akta Kematian (berkas)	8	12	7	6	33	8	12	7	6	33	100
5	Surat pengantar pindah domisili (berkas)	10	19	15	29	73	10	19	15	29	73	100
6	Perekaman E-KTP (orang)	7	9	11	15	42	7	9	4	0	20	48
7	Surat Pengantar Pembuatan Akta Kelahiran (berkas)	9	15	26	16	66	9	15	26	16	66	100
8	Legalisasi berkas (berkas)	25	19	9	33	86	25	19	9	33	86	100
9	Konsultasi perekonomian desa (desa)	4	3	3	4	14	4	3	3	4	14	100
10	Konsultasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan (desa/kelurahan)	4	4	4	3	15	4	4	4	3	15	100
Rata-rata Capaian												95

sedangkan untuk sasaran indicator presentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan juga telah melampaui target dengan nilai 95.

Maka dapat disimpulkan, rata-rata capaian antara tujuan dan sasaran strategis kecamatan yang didukung oleh 2 indikator kinerja utama didapatkan predikat dengan nilai 100 % untuk indikator pertama *Sangat Berhasil*, sedangkan untuk sasaran indikator kedua juga *Sangat Berhasil*

2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023

Tahun 2021 merupakan tahun pertama pelaksanaan indikator kinerja utama dalam Rencana Strategis perubahan Kecamatan Amali 2018 – 2023. Adapun realisasi dan capaian kinerja Pemerintah Kecamatan Amali sebagai berikut:

Tabel 3.2
Realisasi Kinerja Tahun 2018-2020

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Capaian		
			2018	2019	2020
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Hasil Evaluasi Sakip Oleh APIP	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	B	B	B
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Presentas e pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/ditangani	90%	92%	93%
		Persentase Usulan Kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/ Desa	102,5%	105%	120,7%

Sumber data: Hasil Evaluasi Sakip tahun 2020

Tabel 3.3 Realisasi Kinerja Tahun 2019-2023

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data	Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
		Awal 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Amali	Hasil Evaluasi Sakip Oleh APIP	B	B	B	A***	-	-	B	B	A***	-	-
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	90	92	93	95	-	-	92	93	95	-	-

Sumber Data: Dokumen Perubahan Renstra 2018-2023 Kec. Amali & dan Hasil evaluasi internal secara mandiri tahun 2021

Berdasarkan Tabel 3.2 dan 3.3 diatas dapat dijelaskan bahwa hanya 1 indikator kinerja utama Kecamatan Amali yang dapat disandingkan persentase capaian kinerjanya dengan tahun sebelumnya yaitu indikator presentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan. Indikator ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Sedangkan untuk indikator predikat Hasil SAKIP oleh APIP persentase capaian kinerjanya belum dapat disandingkan karena merupakan IKU Baru, tetapi realisasi kinerja pada indikator ini selama kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu Tahun 2018, 2019 dan 2020 tidak mengalami peningkatan (*stagnan*) dengan Predikat **B**.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa tujuan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Amali dengan Hasil Evaluasi Sakip Oleh APIP tahun 2021 mengalami peningkatan *Trend* realisasi dan pencapaian kinerja dari target yang telah ditetapkan, sedangkan meningkatnya kualitas

pelayanan publik dengan presentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan juga mengalami peningkatan *Trend* realisasi dan pencapaian kinerja dari target yang telah ditetapkan.dengan penjelasan sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Amali

Indikator : Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indicator : Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan

3. Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Kecamatan Amali Tahun 2018 – 2023 seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target Jangka Menengah Renstra 2018 -2023

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Amali	Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip	A	B	B	A***		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	97	92	93	95		

Sumber Data: Dokumen Perubahan Renstra 2018-2023 Kec. Amali & dan Hasil evaluasi internal secara mandiri tahun 2021

Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan bahwa rata-rata capaian antara target dan realisasi untuk indikator pertama hasil evaluasi sakip untuk tahun 2021 telah melampaui target, sedangkan untuk sasaran indikator kedua juga telah melampaui target telah melampaui target jangka menengah Renstra Perubahan 2018-2023.

4. Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran strategis adalah dengan membandingkan realisasi kinerja indikator tujuan/sasaran strategis Kecamatan Amali dengan target dan realisasi standar pelayanan minimal/standar nasional sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 3.5
Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal /Standar Nasional Lainnya

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2021	Standar Nasional	
				Target 2021	Realisasi 2021
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Amali	Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip	A***	-	-
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	95	-	-

Sumber Data: Dokumen Pengukuran Kinerja Tahun 2021 Kec. Amali

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian antara target dan realisasi untuk indikator pertama hasil evaluasi sakip oleh APIP dan sasaran indikator kedua persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan tahun 2021 tidak

dapat disandingkan dengan standar pelayanan minimal atau standar nasional lainnya, dikarenakan tidak termasuk dalam indikator SPM ataupun Standar nasional lainnya.

5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian tujuan/sasaran strategis kita lihat tabel ikhtisar pencapaian capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.6

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Rata-rata Capaian	Predikat			
				>110	90= \leq s/d<110	60= \leq s/d<90	<60
				Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Amali	Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip	A***	110	√			
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	95	110	√			

Sumber Data: Dokumen pengukuran kinerja tahun 2021 & dan Hasil evaluasi internal secara mandiri tahun 2021

Berdasarkan data pada tabel 3.5 diatas, dapat disimpulkan bahwa secara

umum realisasi capaian indikator pertama yaitu hasil evaluasi sakip oleh APIP dalam kategori *Sangat Berhasil*, meskipun data ini masih bersifat sementara yang merupakan penilaian mandiri melalui evaluasi internal. Sedangkan sasaran indicator kedua persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dapat di katakan *Sangat Berhasil*.

Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Amali

Indicator : Hasil Evaluasi Sakip Oleh APIP

Sasaran 2: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Indicator : Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan

⇒ Dari tabel di atas, terlihat bahwa pencapaian tujuan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Amali dengan indikator Hasil Evaluasi Sakip Oleh APIP berdasarkan penilain evaluasi internal secara mandiri menunjukkan predikat *Sangat Berhasil* yang mempunyai nilai capain A***. Sedangkan pada tujuan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indicator Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan dalam kategori berhasil yang *Sangat Berhasil* yang mempunyai nilai capaian rata-rata 95.

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

Penyebab Keberhasilan:

- a. Optimalisasi penggunaan Anggaran Tahun 2021 dengan penyerapan anggaran mencapai 97% dengan predikat Kinerja tercapai atau berhasil
- b. Mengoptimalkan Sarana Prasarana yang tersedia

- c. Perencanaan strategis telah dilakukan perubahan melalui perubahan Renstra 2021-2023 untuk menyelaraskan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dengan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Amali
- d. Telah dilakukan pengukuran kinerja secara berkala (per Triwulan).
- e. Pemberdayaan SDM yang ada di Kecamatan
- f. Koordinasi dan komunikasi dengan semua stakeholder baik dari pemerintah Desa dan Kelurahan serta Pemerintah Kabupaten Bone berjalan Baik
- g. Dilakukan evaluasi kinerja, capaian program kegiatan serta realisasi anggaran per Triwulan yang dipimpin oleh Camat

Pencapaian di atas telah mencapai target, namun masih terdapat hambatan dalam pencapaiannya, yaitu antara lain:

- a. Jumlah personil Kecamatan Amali secara kualitas dan kuantitas masih kurang memadai, serta kurangnya SDM yang menguasai secara teknis;
- b. Belum terpenuhinya sarana peralatan operasional untuk pelayanan kepada masyarakat yang memadai;
- c. Sarana dan prasarana perkantoran masih kurang representative;
- d. Masih terdapat benturan kepentingan sehingga manajemen pekerjaan masih kurang maksimal;
- e. Refocusing dan realokasi anggaran sehingga terdapat beberapa kegiatan yang kurang maksimal pelaksanaannya;
- f. Jaringan internet (wifi) belum tersedia.

Beberapa upaya yang telah dilakukan atau Langkah langkah yang diambil untuk meningkatkan kedua indicator diatas adalah sebagaiberikut:

- a. Mengusulkan penambahan anggaran;
- b. Meningkatkan kualitas SDM dengan mengikuti diklat teknis/sosialisasi;
- c. Mengusulkan penambahan pegawai sesuai kualifikasi yang dibutuhkan;

- d. Mengusulkan tambahan kendaraan operasional, sarana dan prasarana demi kelancaran pelayanan umum;
- e. Mengusulkan penambahan sarana pendukung untuk peningkatan pelayanan yang lebih maksimal, dan melakukan pemeliharaan sarana yang ada;
- f. Dilakukan peningkatan kualitas pelayanan public melalui penerapan *e-government*.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Kecamatan Amali dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Sumber daya yang dimiliki Kecamatan Amali adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2021 untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut tabel untuk menganalisis efisiensi sumber daya Kecamatan Amali dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan

Tabel 3.7

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		Efisiensi	
		Tar get	Realisa si	Capai an (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	Sumber Daya %
a	B	c	d	e (d/c x100 %)	f	G	h (g/f x 100%)	i (e-h)
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip	BB	A***	110	7.971.9 92.821	7.603.73 7.316	95,38	4,62

Kecamatan Amali								
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	94	95	110	Rp 389.784.200	Rp 381.907.450	97,97	1,98

Sumber Data: Dokumen Pengukuran Kinerja Tahun 2021 Kec. Amali

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan tujuan/sasaran Pemerintah Kecamatan Amali terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana berdasarkan kinerja yaitu:

1. Indikator meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Amali dengan menggunakan metode evaluasi internal secara mandiri dengan capaian kinerja A*** dan realisasi anggaran mencapai 95,38%, menunjukkan bahwa efisiensi kinerja anggaran mencapai 100% dan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 4,62%.
2. Indikator Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan dengan capaian kinerja 110% dan capaian anggaran 97,97 menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 1,01 % dan efisien penggunaan sumber daya sebesar 1,98%.

7. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Analisis terhadap program/kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Amali sebagai berikut:

Tabel 3.8
Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tujuan/	Indikator	Capaian	Program/	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Rencana
---------	-----------	---------	----------	-----------	--------	-----------	---------	---------

Sasaran Strategis	Kinerja	n (%)	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	(%)	(%)	n (%)	Tindak Lanjut
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Amali	Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip	A***	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Realisasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (%)	100	96	96	Meningkatkan kualitas system perencanaan anggaran
			PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan evaluasi Kecamatan (Dokumen)	100	100,00	100	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kecamatan	100	100,00	100	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terealisasi	100	96	96	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	100	96	96	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	100	98	98	

			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	97	97	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	98	98	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100	95	95	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100	100	100	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	99	99	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	99	99	
			Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel (Paket)	100	100	100	
			Pengadaan	Jumlah Pengadaan	100	100	100	

			Peralatan dan Mesin Lainnya	n Peralatan dan Mesin Lainnya (Paket)				
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Realisasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	99	99	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik dan Wifie yang Terbayarkan (Rekening)	100	100	100	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Terbayarkan (Persen)	100	99	99	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	99	99	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Terpelihara dan Pajak Kendaraan yang	100	99	99	

			Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terbayarkan (Unit)				
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terpelihara (Unit)	3	99	99	
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya yang Terpelihara (Paket)	100	99	99	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	94	95	95	Memperhatikan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Terlaksana	100	99	99	
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Jumlah Realisasi Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan	100	99	99	

			han dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	99	99	Memperhatikan kebutuhan anggaran dengan menyesuaikan kegiatan yang akan dilaksanakan
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	99	99	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100	99	99	
			PEMBERDAYAAN KELURAHAN	Cakupan Realisasi Pemberdayaan di Kelurahan (%)	100	99	99	
			Pembangunan Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana	100	100,00	100,00	

			Prasarana Kelurahan	a yang Terbangun di Kelurahan				
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Terlaksana	100	99	99	
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100,00	100,00	
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100,00	100,00	
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Orang)	100	100,00	100,00	

Sumber Data: Dokumen Pengukuran Kinerja Tahun 2021 Kec. Amali

Berdasarkan tabel 3.7 tentang analisa program/kegiatan yang

menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja, disampaikan hal sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Amali

Indicator : Hasil Evaluasi Sakip Oleh APIP dengan target **BB** telah **Berhasil** melampaui target dengan predikat **A***** berdasarkan hasil evaluasi internal secara mandiri, Indikator ini dapat terlaksana melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indicator : Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan dengan target **94** telah **Berhasil** melampaui target dengan predikat **95**, Indikator ini dapat terlaksana melalui:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

B. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran belanja Kecamatan Amali Kabupaten Bone Tahun 2021 setelah perubahan sebesar Rp. **8.657.637.221** (delapan milyar enam ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran

URAIAN	REALISASI		%
	ANGGARAN	KEUANGAN	
TUJUAN 1	<i>Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Amali</i>		A***
SASARAN 1.1	<i>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Public</i>		95
PROGRAM			

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.559.254.989	7.603.774.158	95
1, Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.260.500	14.940.500	92
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.723.200	8.723.200	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.495.200	2.099.200	84
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.383.900	1.987.900	83
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.658.200	2.130.200	80
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.781.217.087	7.245.217.016	95
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.781.217.087	7.245.217.016	95
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	151.188.450	144.061.450	95
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.585.500	10.528.500	60
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	89.449.000	89.449.000	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.703.950	11.703.950	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	1.200.000	1.180.000	98
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31.200.000	31.200.000	100
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.437.202	12.437.202	100
Pengadaan Mebel	12.437.202	12.437.202	100
5. Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan daerah	95.203.200	94.709.100	99
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.631.200	6.380.100	89

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	88.572.000	88.329.000	99
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98.148.750	92.409.250	94
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67.860.000	65.515.550	97
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	768.000	768.000	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.008.350	26.125.700	87
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	9.264.200	8.064.200	87
1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9.264.200	8.064.200	87
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	9.264.200	8.064.200	87
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	335.520.000	328.843.250	98
1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	105.000.000	87.873.600	84
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	105.000.000	87.873.600	84
2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	245.048.000	244.526.400	99
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	174.715.600	174.715.600	100
Pemberdayaan Masyarakat Di kelurahan	70.332.400	69.810.800	99
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	27.000.000	27.000.000	100

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	27.000.000	27.000.000	100
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	27.000.000	27.000.000	100
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	18.000.000	18.000.000	100
1. Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18.000.000	18.000.000	100
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	18.000.000	18.000.000	100
TOTAL	8.559.254.989	7.985.644.766	96

Sumber Data: Laporan Keuangan Tahun 2021 Kec. Amali

BAB 4

PENUTUP



- A. Simpulan Umum
- B. Kendala Pelaksanaan Dan Upaya Mengatasi

Hal. 37

Hal. 37

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN UMUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) yang disusun Kecamatan Amali Kabupaten Bone merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada publik, yang berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance dalam perspektif yang lebih luas. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja Kecamatan Amali Kabupaten Bone tahun 2021 dengan kualitas pelaksanaan baik, hal ini terlihat pada capaian indikator kinerja utama/sasaran pencapaian tujuan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Amali dengan indikator Hasil Evaluasi Sakip Oleh APIP menunjukkan predikat *Sangat Berhasil* yang mempunyai nilai capaian A*** (berdasarkan penilaian evaluasi internal secara mandiri). Sedangkan pada tujuan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan dalam kategori *Sangat Berhasil* yang mempunyai nilai capaian rata-rata **95%**, sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja Kecamatan Amali Kabupaten Bone dengan kategori capaian **BAIK**. Keberhasilan capaian kinerja tahun 2021 didukung dengan adanya kerja sama yang solid dari *teamwork* di Kecamatan Amali dalam setiap program dan kegiatan capaian kinerja tahun 2021 sebagaimana tersebut di atas.

B. KENDALA PELAKSANAAN DAN UPAYA MENGATASI

Hambatan/Tantangan

1

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima, dan semakin meningkatnya kebutuhan teknologi informasi saat ini.

Kapasitas aparatur Pemerintah Kecamatan Amali seiring dengan dinamika masyarakat yang terus berkembang

2

3

Adanya refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19;

Sarana dan prasarana perkantoran belum representatif;

4

Upaya Mengatasi :

Membangun sistem pelayanan prima yang aman, cepat, efisien, efektif dan transparan serta menyediakan layanan internet (wifi);

1

2

Meningkatkan kinerja aparatur melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan lainnya;

Menyediakan sarana dan prasarana perkantoran melalui penganggaran tahun berikutnya untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan;

3

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Amali Kabupaten Bone ini dapat menjadi bahan atau informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat di Kecamatan Amali. Diharapkan pula pada tahun mendatang kinerja Kecamatan Amali Kabupaten Bone dapat semakin ditingkatkan searah dengan tugas dan fungsi Kecamatan selaku perpanjangan tangan Bupati melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di wilayah kecamatan dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepada Daerah.